# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang mengarah pada perkembangan dunia internasional semakin memudahkan masyarakat internasional yang dibatasi oleh jarak dalam berkomunikasi. Perkembangan yang pesat dalam bidang informasi, komunikasi dan transportasi juga mendukung kemudahan masyarakat global dalam berinterkasi. Terjadinya interaksi antar manusia di seluruh dunia seperti itu membuat batas negara seakan memudar, atau bahkan tidak ada lagi batas negara yang dapat menciptakan dunia tanpa batas atau borderless word. (Ohame,K, 2005) Dunia Internasional pun turut mengikuti perkembangan zaman, hal itu terbukti dengan politik luar negeri yang saat ini semakin beragam, tidak hanya dengan cara tradisional, baik dari actor di dalamnya maupun cara dalam melakukan politik luar negeri. (Plujm & Melissen, 2007) Pekerkembangan dalan kancah hubungan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari banyaknya actor-aktor yang dapat dan/atau memiliki kepentingan dalam dunia internasional. Salah satunya yaitu dengan adanya hubungan sister province.

Sister province adalah istilah yang biasa diterapkan sebagai dua provinsi atau kota dari negara berbeda yang memiliki hubungan diplomatik. Pada awalnya, sister province hanya bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar negara yang berbeda. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan keinginan masyarakat untuk mewujudkan kepentingannya sendiri, kerja sama tersebut tidak lagi sebatas mempererat hubungan kedua negara. Namun dengan terjalinnya hubungan baik kedua negara, kerjasama tersebut kini telah berkembang menjadi kerjasama konkrit yang saling menguntungkan.(Bagian Kerjasama kota bandung.)

Walaupun begitu, Hubungan kerja sama *sister province* tetap menjadi ssuatu kegiatan yang diharapkan dapat membantu menunjang hubungan diplomatic antar kedua Negara. Negara dari provinsi tersebut dapat saling mengenal potensi yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang menjain hubungan *sister province* sehingga dapat meningkatkan potensi tersebut dalam skala provinsi melalui *sister province.* Walaupun hubungan *sister province* tidak lagi berorientasi untuk menumbuhkan dan menjaga hubungan baik kedua Negara dimana provinsi itu bedara, tetapi hubungan antar provinsi tetap dapat bermanfaat bagi Negara khususnya untuk provinsi. Karena pada dasarnya dalam berjalannya *sister province,* negara tetap berperan peran signifikan. *Sister province* dapat dijalin oleh provinsi dari dua negara yang memiliki hubungan diplomatik. Karena pada dasarnya negara memiliki hak dengan siapakah atau dengan negara mana ia dapat menjalin hubungan. Selaitu itu, kewenangan negara jika dilihat dari pemerintahan lebih tinggi dari pemerintah daerah. Sehingga untuk kegiatan diplomatic dalam *sister province* pun negara tetap memiliki kewenangan.(Menteri Dalam Negeri, n.d.)

Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang menjaling hubungan *sister province* dengan beberapa provinsi atau negara bagian dari negara lain. salah satu mitranya yaitu Australia Selatan. Kedua provinsi ini telah menjalin hubungan sejak lama. Jalinan antar dua Provinsi ini ini diawali dengan adanya Kerja sama antar kedua belah pihak yang ditandai dengan penandatangan *letter of Intent* (Lol)/ Naskah Pernyataan keinginan bersama yang dilangsungkan di Bandung pada 17 April 1997. Lol kemudian ditandak lanjuti dengan kesepatan MoU yang ditanda tangani pada 21 Agustus 1997 di Adelaide oleh Gubernur Jawa Barat Pada saat itu (R. RNuriana) dan Premier Australia Selatan (John W. Olsen). Namun pada saat itu, kerja sama ini sempat terhenti sampai dengan tahun 2007. Kerja sama kembali terjalin setelah kedua provinsi melakukan revitalisasi dengan mengadakan beberapa pertemuan untuk kembali menjalin hubungan *sister province.*

Pada tahun 2012, pemerintah Australia Selatan memiliki inisiasi untuk melakukan revitalisasi kerja sama *Sister Province* yang telah terjalin sebelumnya. Pemerintah Australia Selatan menawarkan untuk melakukan revitalisasi, pemerintah Jawa Barat menerima permintaan yang diajukan pemerintah Autralia Selatan. Namun pada saat itu revitalisasi sempat mengalami hambatan. Hambatan tersebut dialami oleh kesiapan dari pemerintah Jawa Barat sendiri. Jawa Barat mengalami ketidak siapan untuk mengalami revitalisasi, ketidak siapan tersebut terjadi karena ada ketidak sinergisnya Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) dengan pembiayaan untuk program dan kerja sama yang akan dilakukan. Setelah proses beberapa tahun untuk mempersiapkan kembali revitalisasi, barulah pada tahun 2015 kerja sama *Sister Province* Jawa Barat dan Australaia kembali terjalin yang ditandai dengan penandatanganan MoU yang ditandatangani di sela-sela pembukaan festival terbesar di Australia ‘ozAsia’ oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Premier Australia Selatan yang bertempat di Adelaide pada 24 September 2015.(Sari, 2018)

 Setelah melewati proses tersebut, Jawa Barat dan Australia Selatan kembali membangun kerja sama dalam beberapa bidang yang antara lain bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, peluang perdagangan dan juga pariwisata. Kerja sama ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap kedua provinsi. Terlebh lagi dapat dilihat bahwasannya kerja sama ini dibentuk dengan focus untuk meningkatkan pembangunan daerahnya masing- masing.

 Kerja sama antara Jawa Barat dan Australia Selatan merupakan salah satu kerja sama yang terbaik pada masa pemerintahan gubernur Jawa Barat pada saat itu, Ahmad Heryawan. Tercatat dari 22 program kerja yang dicanangkan 17 diantaranya dapat berjalan dengan baik.(Humas Jabar, 2018) Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwasannya kerja sama antara Jawa Barat dengan Australia Selatan memiliki potensi yang sangat baik dalam jangka waktu panjang. Jawa Barat dan Australia selatan harus dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing- masing provinsi. Dari beberepa bidang yang menjadi kesepakatan antara Provinsi Jawa Barat- Australia Selatan, salah satunya yaitu bidang pendidikan.

 Pendidikan merupakan suatu elemen yang amat penting bagi bagi setiap manusia dalam proses memajukan negara. Serta sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan negara guna menjadi negara yang lebih maju. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses yang beradab, yaitu kerja keras Menyebarkan nilai-nilai luhur bagi generasi berikutnya dalam masyarakat Tidak hanya untuk mempertahankan, tetapi untuk dapat terus meningkatkan dan Mengembangkan budaya menuju keluhuran hidup manusia. (Haryanto, 2012)

Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia ke-20 secara jelas mendefinisikan konsep pendidikan 2003. Bab 1, Pasal 1, Angka 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana Menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga siswa dapat aktif mengembangkan potensinya dan memiliki kekuatan spiritual spiritual Agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan Keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, negara dan negara. Gerakan reformasi Indonesia umumnya membutuhkan implementasi Prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia Orang-orang di negara dan kehidupan negara. melawan Pendidikan, prinsip-prinsip ini akan memiliki dampak mendasar Mengenai isi, proses dan pengelolaan sistem pendidikan. Selain itu, ilmu Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan tuntutan-tuntutan baru Dalam semua aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, Australia merupakan salah satu negara dengan mutu pendidikan terbaik di dunia. Degan jumlah warga melek huruf mencapai 99% serta memiliki system pendidikan yang sangat baik dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas. Dengan melihat hal tersebut, Jawa Barat dapat memanfaatkan kerja sama ini sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikannya dengan melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan di Jawa Barat.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Jawa Barat memilih Australia Selatan sebagai Mitra kerja Sama?

2. Bagaimana perkembangan pendidikan di kedua Provinsi?

3. Bagaimana program - program kerjasama Jawa Barat – Australia Selatan dapat meningkatkan pendidikan di Jawa Barat?

###  1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah pada penelitian ini, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis berfokus pada proses dan dampak dari kerja samaProvinsi Jawa Barat dan Negara Bagian Australia Selatan.

###  1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan Identifikasi Masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan Perumusan Masalah yaitu: “**Bagaimana implementasi kerjasama *sister province*  antara Jawa Barat- Australia Selatan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat”**

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

###  1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki tujuan tertentu berdasarkan kepentingan serta motif-motif individual maupun kolektif. Penelitian ini dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan seperti yang tercantum pada identifikasi masalah. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang kerja sama *sister province* Jawa Barat - Australia Selatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan di kedua Provinsi.

3. Untuk mengetahui bagaimana program - program kerjasama Jawa Barat – Australia Selatan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat.

###  1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagi berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Strata-Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan terapan bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai hubungan antara provinsi kembar Jawa Barat dan Australia Selatan.
3. Dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang ingin mengkaji masalah yang sama dengan penelitian ini dan menjadi acuan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut hubungan kerjasama antar provinsi yang bersaudara antara Jawa Barat dan Australia Selatan dalam meningkatkan kunjungan wisman khususnya Barat Jawa dan Australia Selatan, serta Indonesia pada umumnya.